

EKONOMI INDONESIA, ISLAMIKAH?
Economic Islamicity Index (EI²) Indonesia dalam
Perspektif *Maqashid Syariah*

Muhammad Sholihin

IAIN Curup, Rejang Lebong, Indonesia

Email: sholihin@iaincurup.ac.id

Abstrak: Artikel ini ditujukan untuk menakar seberapa sejalan, atau *Islami perekonomian Indonesia jika dianalisa dengan teori maqashid syariah. Tujuan ini didasarkan pada fakta empiris bahwa ekonomi Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang sejatinya kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi dasar argumentasi mengapa penelitian penting dilakukan. Untuk dapat mendapatkan informasi terkait tujuan penelitian ini, maka kajian ini menerapkan pendekatan integratif, yakni pendekatan yang mengkombinasikan metode survei secara online dan pendekatan kepustakaan, atau library research. Memperkuat pemahaman, dan pemaknaan atas data maka penelitian ini menggunakan paradigma fiqh, khususnya teori maqashid syariah dan paradigma ekonomi pembangunan, yang secara khusus meminjam teori yang dikemukakan oleh Abbas Mirakhor dan Hossein Askari tentang dimensi pembangunan Islam. Temuan dari kajian ini secara umum dirumuskan ke dalam sebuah tesis bahwa kini Indonesia tengah dihadapkan pada ambivalensi religiusitas negara dan perilaku ekonomi rakyat: sebuah hubungan negatif, antara kebijakan ekonomi negara dan*

perilaku ekonomi rakyat. Ketika negara merumuskan kebijakan ekonomi terjebak pada neo-liberalisme, dan semangkin jauh dari prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *EP², Kesejahteraan, Maqashid Shariah, neo-liberal, dan ekonomi Islam.*

Abstract: *This article aims to measure how closely or Islamic the Indonesian economy is when analyzed with the theory of maqashid sharia. This goal is based on empirical facts that the Indonesian economy is based on Pancasila, which is in fact compatible with Islamic values. This is the primary fondation of the argument why research is important. To be able to obtain information related to the objectives of this research, this study applies an integrative approach, which is an approach that combines online survey methods and library approaches, or library research. Strengthening understanding and understanding of the data, this study uses the fiqh paradigm, specifically the sharia maqashid theory and the economic development paradigm, which specifically borrows the theory put forward by Abbas Mirakhor and Hossein Askari about the dimensions of Islamic development. The findings of this study are generally formulated into a thesis that Indonesia is now faced with the ambivalence of state religiosity and people's economic behavior: a negative relationship between state economic policy and people's economic behavior. When the state formulates economic policy it is trapped in neo-liberalism, and is far from Islamic principles.*

Keywords: *EP², Welfare Maqashid Shariah, islamic development, neo-liberalism, and islamic economics.*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam bukan anti-tesis dari kapitalisme, apalagi sosialisme. Namun perkembangan dan kemunculan kembali ekonomi Islam dewasa ini hampir tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kapitalisme-lanjut, atau *the late capitalism*: sebuah sistem ekonomi yang mengandung, dan membawa secara genetik krisis ekonomi. Kebangkitan ekonomi Islam dalam konteks itu agaknya dapat diartikan sebagai sebuah kesadaran yang tumbuh di kalangan ekonom muslim, bahwa krisis kapitalisme itu buruk bagi ekonomi global dan tentu sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam. Lebih mendalam lagi S.M. Ghazanfar memaknai bahwa kebangkitan ekonomi Islam adalah efek, dan akibat langsung dari benturan peradaban, atau *clash civilization* antara Barat dan Timur.¹ Barat terus berupaya agar belahan dunia ketiga di Timur mendefinisikan mereka sebagai negara adidaya, dan contoh terbaik bagi pembangunan ekonomi global. Padahal di bagian Timur, ada sekelompok ekonom Muslim yang sudah bergerak dan kembali mencari sisa-sisa romantisme ekonomi Islam dan kemudian

¹ Peristiwa 9/11 atau WTC tragedi di Amerika Serikat telah menghidupkan kembali diskusi akademik tentang *civilization clash* antara Barat *vis-a-vis* dunia Islam. Tanpa disadari tragedi dan perdebatan itu menumbuhkan kesadaran baru dikalangan kaum akademik dunia untuk terus menumbuhkan kebangkitan dialog antara kultur dan bangsa. Bersamaan dengan itu, kesadaran mendalam pun muncul dikalangan umat Islam; khususnya ekonom Muslim untuk kembali memikirkan ulang tatanan ekonomi global—kapitalisme—yang telah banyak memakan korban. Keserakahan, dan ketidakadilan ekonomi, serta gap antara negara maju dan berkembang semakin menganga. Lihat S.M. Ghazanfar & S. Todd Lowry. *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the "Great Gap" in European Economics*. (New York: Routledge, 2003). Hlm. 1.

kembali menegakkan ekonomi Islam sebagai sebuah solusi. Disitu kemudian Ekonomi Islam kembali mendapatkan momentumnya untuk bangkit, dan mengisi kekosongan dalam ekonomi modern; atau bangkit untuk meruntuhkan kepercayaan global terhadap sistem kapitalisme lanjut. Dua kesangsian terakhir terhadap kebangkitan ekonomi masih terus tumbuh, dan bahkan berkembang menjadi kerja metodologis yang tidak saja melakukan kritik terhadap idealisme ekonomi Islam tetapi juga terhadap aplikasi ekonomi Islam. Dan mazhab alternatif ekonomi Islam tampil dalam ranah itu: mengkritik ekonomi Islam dan sistem ekonomi global sekaligus.

Mazhab alternatif ekonomi Islam telah mengembangkan beberapa kritik fundamental terhadap ekonomi Islam, dan itu adalah: *Pertama*, aspek metodologis: ekonomi Islam adalah ekonomi normatif, dan ini membuat ekonomi Islam harus mampu mengevaluasi realitas dan perilaku ekonomi yang terlanjur disebut alamiah, dan sesuai dengan hukum alam; *Kedua*, aspek ideologis dan praktek ekonomi Islam: perkembangan ekonomi Islam dewasa ini memperlihatkan gejala yang menakjubkan sekaligus menimbulkan kesangsian yang mendalam atau paradoks. Mengapa demikian? Perkembangan ekonomi Islam seolah-olah berhenti pada ekonomi institusional dan ekonomi finansial semata. Ini dapat dilihat dari kemampuan ekonomi Islam melahirkan bank syariah, tetapi terjebak pada kebuntuan dalam hal melahirkan kritik dan

teori alternatif terhadap ekonomi kesejahteraan². Ini adalah kritik paling radikal, dan membuat ekonom Muslim dipaksa untuk mengkaji ulang konsepsi dan praktek ekonomi Islam. Kendati demikian, di berbagai negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam; tumbuhnya institusi perbankan syariah sudah memuaskan para ekonom muslim di sana. Sebuah sikap yang menerima begitu saja, bahwa ekonomi Islam terhenti pada syariahtisasi perbankan. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Idealnya ekonomi Islam harus menyentuh hal paling fundamental dari sebuah sistem ekonomi, yakni ideologi dan perilaku ekonomi masyarakat muslim di satu negara. Dalam konteks ini kemudian berbagai teori ekonomi Islam yang lahir dari dua sumbernya—al-qur'an, hadith dan fakta empiris—harus mampu dirumuskan oleh ekonom Muslim. Mengapa teori itu penting? Betapa tidak, teori dalam disiplin ilmu ekonomi memiliki dan memuat karakter alamiah yang menjadi sebuah keniscayaan. Ia tidak saja menggambarkan realitas ekonomi, lebih dari itu bagi manusia menjadi panduan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Karl E. Case & Ray C. Fair mengistilahkan hal itu dengan *economic theory*: sebuah usaha untuk melakukan

² Kritik mazhab alternatif terhadap ekonomi Islam yang terkesan sinis, dan meragukan eksistensi ekonomi Islam dapat dimaklumi. Hal itu disebabkan ekonomi Islam baru mampu menyentuh permukaan ekonomi dengan semesta simbol-simbol syariah. Namun substansi ekonomi—kesejahteraan, dan keadilan sosial ekonomi—masih saja belum tersentuh oleh ekonomi Islam sebagai sebuah praktek ekonomi. Ekonomi Islam baru mampu digerakkan oleh *bussiness minded*, atau nalar bisnis sehingga membuat ekonomi Islam tercerabut dari keotentikannya sebagai sumber kemaslahatan ekonomi.

generalisasi terhadap data atau sekadar menafsirkannya.³ Dengan cara itu kemudian ilmu ekonomi mampu diterima, dan teori-teorinya menjadi panduan dalam perilaku ekonomi. Demikian juga halnya dalam ekonomi Islam.

Demikian, berbagai pemodelan mulai dilakukan dalam ekonomi Islam. Tujuannya adalah agar ekonomi Islam sebagai sebuah teori ekonomi dapat dipahami, dan menghindarkan kesan bahwa ekonomi Islam sangat normatif dan doktriner. Itu yang dikemukakan oleh banyak pembela mazhab mainstream ekonomi Islam. Semua ini bermuara pada positivisasi ekonomi Islam. Hal ini dapat dimaklumi, karena positivisme dewasa ini tidak tergantikan dalam ilmu ekonomi. Kendati demikian, ekonomi Islam tidak sebatas teorisasi ekonomi Islam ataupun syariahtisasi institusi perbankan; lebih dari itu ekonomi Islam harus mampu menjadi alat untuk mengukur, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi. Jika pandangan ini dihubungkan dengan konteks ekonomi Indonesia, maka ekonomi Islam tentunya dapat menyediakan seperangkat metodologi untuk memahami apakah sistem ekonomi Indonesia sudah islami, dan erat hubungannya dengan agama? Atau sebaliknya, gejala sekularisasi ekonomi semakin menguat meskipun perbankan syariah bermunculan. Mengapa hal ini (kritik ekonomi Islam berupa pendekatan

³ Lihat Karl E. Case & Ray C. Fair. *Principle of Economics*. (New York: Prentice Hall, 2003). Hlm. 10.

maqashid syariah) penting dilakukan terhadap sistem ekonomi Indonesia?

Tidak dapat dibantah bahwa Indonesia adalah negerinya kaum muslim, tetapi tidak lantas Indonesia adalah *darul Islam*: sebuah istilah untuk memaknai satu negara yang benar-benar menerapkan prinsip Islami, meskipun ia bukanlah negara Islam. Seperti yang diistilahkan oleh Ronald-Lukens Bull ketika menyebut Amerika Serikat sebagai *darul Islam*.⁴ Mempersoalkan ekonomi Indonesia, setidaknya akan dihadapkan kepada beberapa kenyataan: *Pertama*, gap sosial-ekonomi di Indonesia yang masih lebar, dan pengangguran yang masih saja menjadi persoalan dan tantangan utama Indonesia. Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia terlihat bahwa kemiskinan masih saja berada pada digit yang mengkhawatirkan. Tercatat pada tahun 2012; 11,6% penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka yang ditamatkan dari tahun 2004-2012 di Indonesia per-februari masih berkisar di angka 7.170.523 orang.⁵ Secara teoritis, baik masalah kemiskinan maupun pengangguran merupakan masalah relatif umum yang dihadapi oleh banyak

⁴ Bekasi, 4 September 2013. Pernyataan itu dikeluarkan dalam Forum Intersym tentang *Empowering Madrasa in the Global Context-2013*.

⁵ Lihat dalam www.bps.go.id Baik kemiskinan maupun angka pengangguran di Indonesia sesungguhnya tidak sepenuhnya disebabkan oleh pribadi, melainkan dipicu oleh kompleksitas masalah ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia.

negara di dunia terutama negara-negara berkembang. Kitty Steward dan John Hills (2005) mengemukakan satu analisisnya terhadap masalah ekonomi seperti kemiskinan; baginya kemiskinan disebabkan oleh perubahan sangat cepat yang terjadi dalam struktur ekonomi. Sementara manusia yang hidup dalam satu sistem ekonomi, cenderung statis dan lamban untuk beradaptasi dengan tuntutan ekonomi global.⁶ Hal lain, seringkali kemiskinan dan pengangguran berhubungan erat dengan krisis ekonomi, baik krisis ekonomi yang disebabkan oleh faktor alamiah terlebih lagi didorong oleh *human errors*, atau kesalahan manusia. Dalam konteks ini kemudian kehadiran negara diperlukan untuk memastikan berjalannya mekanisme ekonomi. Meskipun kelompok anti-intervensionisme⁷ ekonomi berkeyakinan bahwa campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Karena sebuah sistem ekonomi, meskipun digerogeti krisis, akan selalu mencari titik keseimbangan baru. Padahal di luar sana, dalam gerak perekonomian sesungguhnya tidak ditemukan apa yang

⁶ Kompleksitas perubahan ekonomi global mendorong pemerintah untuk sangat hati-hati dalam merumuskan kebijakan reduksi terhadap *social and economic disadvantage*—kemiskinan dan pengangguran. Ini adalah hal mutlak yang dilakukan oleh pemerintah, agar resep generik terhadap masalah kemiskinan dan *social disorder* menjadi sebuah obat yang manjur. Lihat dalam John Hills & Kitty Stewart (eds.). *A More Equal Society?: New Labour, Poverty, Inequality and Exclusion*. (United Kingdom: Policy Press, 2005). Hlm. 1.

⁷ Mazhab anti-intervensionisme merupakan anti tesis dari mazhab intervensionisme ekonomi; dimana mereka mengasumsikan bahwa sistem ekonomi harus bebas dari intervensi negara, agar manusia benar-benar mampu menjadikan kebebasan ekonomi sebagai kendaraan terbaik untuk menuju *equilibrium* ekonomi. Lihat dalam Ludwig von Mises. *A Critique of Interventionism*. (New York: Springer, 1977). Hlm. 15.

diistilahkan dengan gerak alamiah; melainkan semuanya digerakkan oleh *interest*, atau kepentingan berbagai aktor ekonomi. Kebebasan menjadi penentu dari gerak dan kualitas ekonomi. Semakin bebas satu sistem perekonomian, maka semakin lemah peran negara dan semakin terbuka berbagai penyimpangan ekonomi. Disinilah kemudian *economic disadvantage* seperti kemiskinan dan pengganguran hadir, dan menjadi sebuah kenyataan.

Kedua, menguatnya peran dan kekuasaan *Transnational Corporation* (TNC), dan *Multinational Corporation* (MNC). Kenyataan ini bermakna bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, ironisnya kekayaan itu belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyat. Meskipun Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat 2, mengamanatkan hal itu. Faktanya 95% pertambangan minyak bumi di Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing⁸. Pertanyaannya bagaimana mungkin hasil minyak bumi atau sektor Migas Indonesia mampu menyejahterakan rakyatnya jika pemiliknya saja bukan perusahaan nasional, melainkan adalah korporasi asing? *Ketiga*, perekonomian Indonesia tanpa disadari

⁸ Ichsanuddin Nursi menegaskan bahwa 95% sektor migas Indonesia dikuasai oleh pihak asing, dan PT. Chevron asal Amerika Serikat adalah penguasa migas terbesar di Indonesia, mengambil porsi 44%. Lihat dalam *95% Migas Indonesia dikuasai oleh Pihak Asing*. Retrived from: <http://gagasanriau.com/95-persen-migas-indonesia-dikuasai-korporasi-asing/>. Accessed at September 8, 2012|Time. 19:42 PM.

masih ditopang oleh *underground economy*: aktivitas ekonomi ilegal, baik dalam bentuk perdagangan barang haram maupun aktivitas pencucian uang. Chatib Basri, seorang ekonom dari Universitas Indonesia memperkirakan setidaknya 40% dari PDB (Product Domestic Bruto) terdiri dari aktivitas ekonomi ilegal, atau *underground economy*.⁹ Tiga permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia ini mengandaikan adanya paradoks dalam sistem ekonomi Indonesia. Paradoks itu dapat diartikan dengan ambivalensi antara kuantitas umat Islam namun sistem dan perilaku ekonomi memperlihatkan sisi sebaliknya—sekuler, dan terkadang belum merepresentasikan nilai-nilai Islam. Bagaimana hal ini dijelaskan?

Meskipun mayoritas ekonom percaya ada banyak faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Namun hubungan antara ekonomi dan agama, dalam hal ini adalah Islam tidak dapat diremehkan. Dalam beberapa kasus, Islam telah mendorong pertumbuhan ekonomi selama satu negara benar-benar menerapkan nilai-nilai universal Islam dalam regulasi dan mengatur aktivitas ekonomi. Namun menariknya, meskipun Indonesia dihuni oleh mayoritas umat Islam tetapi kuantitas itu tidak menjadi fondasi argumentasi dan pertimbangan bagi negara untuk mengatur dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih

⁹ Kompas, 19/02/2003. Accessed 10 Desember 2019. Pukul 08:00 wib

¹⁰ Lihat Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari. *An Economic Islamicity Index (EI²)*. Global Economy Journal. Vol. 10, Issued 3-2010. Hlm. 1.

islami. Bagaimana asumsi tersebut dibuktikan? Apa sesungguhnya nalar ekonomi yang digunakan oleh negara dalam merumuskan regulasi ekonomi? Bagaimana teori *maqashid syariah* menjelaskan dan mengkritik kenyataan tersebut? Paper atau tulisan ini akan mencoba mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga karakter perekonomian Indonesia dapat dipahami berdasarkan teori *maqashid syariah* serta diukur berdasarkan *economic islamicity index*: sebuah indeks yang memperlihatkan seberapa religius dan islami sebuah sistem ekonomi dalam satu negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam makna yang diberikan oleh positivisme, niscaya berangkat dari data dan berakhir juga pada data. Dalam artian data lah yang melahirkan teori. Karena secara ideologis, data adalah sumber dari teori. Barney G. Glaser & Anselm L. Strauss menyebut hal itu dengan *generating it (theory) from data*.¹¹ Pandangan ini kemudian mengurita, dan menjadi keyakinan umum yang diterapkan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Hanya saja pemaknaan terhadap data relatif berbeda sesuai dengan bidang ilmu dimana penelitian itu dilahirkan, dikonstruksi, dan dibangun. Dalam penelitian ekonomi konvensional, juga ekonomi Islam misalnya; data adalah hal mutlak untuk melahirkan teori dan

¹¹ Barney G. Glaser & Anselm L. Strauss. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. (London: Aldine Transaction, 2006). Hlm. viii.

hukum ekonomi. Sedikit berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam tradisi ekonomi Islam; data bersumber dari dua bentuk, yakni realitas sebagai hal yang empiris dan al-Qur'an dan hadith sebagai hal yang normatif. Baik realitas maupun teks Islam, keduanya secara simultan membentuk teori ekonomi. Berbagai pola, dan model penafsiran pun muncul dari hal tersebut. Sebagian ekonom Muslim ada yang berupaya melakukan verifikasi teks Islam (baca; al-Qur'an dan hadith) melalui data. Sebagian yang lain, melakukan hal sebaliknya. Keduanya adalah sah dan benar berdasarkan konteks penelitian yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan penelitian ini?

Memahami relasi antara agama dan ekonomi, ataupun sebaliknya adalah hal yang kompleks. Karena itu bukanlah hal yang mudah untuk menarik kesimpulan, bahwa antara agama dan ekonomi memiliki hubungan yang kuat. Meskipun tidak sedikit peneliti yang berhasil menangkap hubungan itu seperti Mohamad Sobary; Max Weber. Namun untuk melihat pengaruh agama dalam sistem ekonomi diperlukan metode yang khas, dialektik, dan tentunya tidak melulu mengandalkan uji empiris semata. Melainkan diperlukan investigasi teoritis, agar *dantum* atau data tidak hanya menjelaskan tetapi juga dapat dijelaskan melalui teori. Hossein Askari & Scheherzade S. Rehman bahkan telah mengidentifikasi bahwa teori ekonomi yang dihasilkan oleh ekonom klasik sesungguhnya telah memperlihatkan hubungan

yang kuat antara agama dan ekonomi.¹² Kendati demikian, hubungan antara agama dan ekonomi kembali gencar diteliti pada pertengahan 1970-an. Hal itu dapat dilihat dari kerja akademik Corry Azzi dan Ronald Ehrenberg (1975); bahkan pasca- peristiwa 11/09-2011 dan awal era 1990-an, kajian itu dengan intensif dilakukan, tidak hanya oleh ekonom tetapi ilmuwan sosial lain pun turut dalam proyek ini. Secara esensial, kajian agama dan perilaku ekonomi telah berkontribusi terhadap teori ekonomi. Hossein Askari menulis bahwa, “..pada beberapa level: memproduksi informasi tentang terabaikannya are *non-market behavior*, memperlihatkan bagaimana model bisa dimodifikasi untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kepercayaan, norma-norma, dan nilai-nilai; serta mengeksplorasi bagaimana agama (moral dan budaya) mempengaruhi *economic attitude* dan aktivitas individu, kelompok dan masyarakat.”¹³

Demikian, tidak berlebihan dan telah banyak karya ekonom yang menunjukkan bahwa mereka berusaha membuktikan bahwa manusia—siapa pun—cenderung menjadi pribadi yang rasional dalam pilihan seperti membeli dan menjual komoditas.¹⁴ Kendati demikian, adakalanya agama turut menyumbangkan irrasionalitas tindakan seperti kelompok radikal yang berusaha dengan instensif mempengaruhi kelompok anak muda agar melakukan bom-bunuh

¹² Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari. *An Economic...*, hlm. 5.

¹³ Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari. *An Economic...*, hlm. 5-6.

¹⁴ Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari. *An Economic...*, hlm. 7.

diri, dan tindakan kekerasan lainnya. Agama di sini menjadi alat untuk mempengaruhi, bahkan mencuci otak generasi muda. Hubungan antara agama dan pergerakan ekonomi, bahkan dengan politik telah diteliti oleh A.M.C. Waterman yang kemudian ia publikasikan menjadi buku *Revolution, Economics and Religion: Christian Political Economy, 1798-1833*. Dalam bukunya ini Waterman setidaknya telah berhasil menarik hubungan antara perilaku ekonomi dan pilihan individu terhadap ideologi. Baginya ekonomi, dengan teori-teori yang diproduksi darinya telah berhasil dengan gemilang mempengaruhi perilaku beragama seseorang. Hal itu terlihat dari masuknya prinsip *de maximis et minimis in fluxious*, atau keuntungan maksimal dengan biaya minimum pada setiap kehidupan termasuk dalam perilaku agama yang melibatkan kalkulasi rasional.¹⁵

Jauh sebelum teori yang diperkenalkan A.M.C. Waterman, Max Weber melalui karya monumentalnya *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme* telah menunjukkan hubungan yang jelas antara etika protestan dengan pertumbuhan kapitalisme. Dikomentari oleh Bryan S. Turner (1974), bahwa tesis Max Weber tentang kapitalisme telah melahirkan dan membantu sarjana sosial yang lahir setelah Max Weber dalam hal mengklasifikasi hubungan

¹⁵ Ini lebih dapat diartikan bahwa terkadang agama, dengan karakter perfectionis yang terkandung di dalamnya serta *ukhrawi-oriented* tergantikan oleh pandangan ekonomi yang mengejar kepentingan diri. Lihat dalam A.M.C. Waterman. *Revolution, Economics and Religion: Christian Political Economy, 1798-1833*. (New York: Cambridge University Press, 1991). Hlm. 53.

antara agama dan kapitalisme di Eropah dan Asia. Mereka lebih cenderung menyebut tradisi Eropah sebagai *puritan asceticism* dan *mystical ethics* terhadap agama-agama di Asia.¹⁶ Sebuah kondisi yang sangat kontras; dimana Eropah sebagai pusat dari tradisi sekularisasi ekonomi atau gerakan dari objektivikasi ekonomi; sebuah kenyataan dimana agama dirasionalisasikan untuk mendukung kemajuan dan pencapaian prinsip-prinsip ekonomi. Sementara itu, Asia merupakan kawasan di mana agama-agama bertumbuh dan saling berebut posisi mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Hal senada juga pernah diteorisasikan oleh Rebecca M. Blank & William McGurn bahwa dewasa ini ada sebuah kecenderungan umum yang mengasumsikan bahwa agama terlalu fokus mengatur perilaku individual, tanpa instensi yang kuat untuk mempengaruhi kehidupan dunia. Ini maklum, karena kebanyakan elit dan pemuka agama manapun cenderung mengajarkan umat dan pemeluknya untuk menjadi pribadi yang asketik.¹⁷ Dalam kondisi ini kemudian agama cenderung menjadi hal yang inferior, dan elementaristik. Nalar-nalar agama di ruang publik terkadang dihindarkan, dan digantikan oleh nalar-nalar yang

¹⁶ Meskipun Max Weber tidak merampungkan penelitiannya tentang Islam, namun itu telah cukup berpengaruh terhadap teori sosiologi yang cenderung mengabaikan Islam sebagai sesuatu yang konsekuen, dan memberi pengaruh terhadap perilaku umatnya dalam banyak bidang kehidupan. Lihat dalam Bryan S. Turner. *Islam, Capitalism and the Weber Theses. The British Journal of Sociology*. Vol. 25, No. 2-June, 1974. Hlm. 230.

¹⁷ Lihat dalam Rebecca M. Blank & William McGurn. *Is the Market Moral? A Dialogue on Religion, Economics & Justice*. (Washington, D.C.: Brooking Institution Press, 2004). Hlm. 1.

bersumber dari *self-interest*, dan *power-interest*. Dalam konteks ini kemudian agaknya layak mempersoalkan hubungan seperti apa yang dibangun oleh aktor dalam satu negara, dalam hal ini adalah Indonesia terhadap agama dan ekonomi. Penelitian ini berusaha menelusuri hubungan tersebut, sekaligus melakukan kritik terhadap praktek ekonomi yang dirumuskan oleh negara.

Secara metodologis penelitian¹⁸ ini akan dielaborasi untuk:

a) memetakan opini dan preferensi publik terhadap perekonomian Indonesia; b) mengkaji konsekuensi ekonomi terhadap agama; c) menggunakan prinsip-prinsip *maqasid syariah* sebagai bagian dari prinsip teologis untuk mengkritik kebijakan ekonomi dan kecenderungan sistem ekonomi Indonesia, sekaligus melakukan evaluasi terhadap ekonomi Islam. Tiga usaha metodologis ini hanya dapat dilakukan jika diaplikasikan metode, atau alat yang mampu menjelaskan objek kajian. Dalam konteks ini, agaknya tidak berlebihan jika penelitian memformulasi metode yang relatif baru kendati tidak bisa dikatakan pertama kali, tetapi metode ini terbilang berbeda dengan tradisi penelitian empirisme yang terlalu mengandalkan data atau tradisi hermeneutika yang bersandar secara kuat pada eksistensi teks. Penelitian ini mengabungkan

¹⁸ ¹⁸ Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari setidaknya telah mengajarkan metodologi dan pendekatan yang relatif baru untuk memahami, dan menjelaskan hubungan simultan antara agama dan ekonomi. Metode yang berangkat dari perilaku ekonomi, menuju ke kebijakan ekonomi; setelah itu melakukan kritik terhadap kebijakan itu dengan prinsip dan teori yang berasal dari agama dan ajaran moral. Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari. *An Economic...*, hlm. 7.

keduanya—data dan teks sekunder. Itu dimaknai sebagai dua hal yang saling mendukung, dan secara simultan¹⁹ memberikan informasi terhadap peneliti, sehingga objek kajian dapat dijelaskan lebih luas, dan mendalam serta differensiatif.

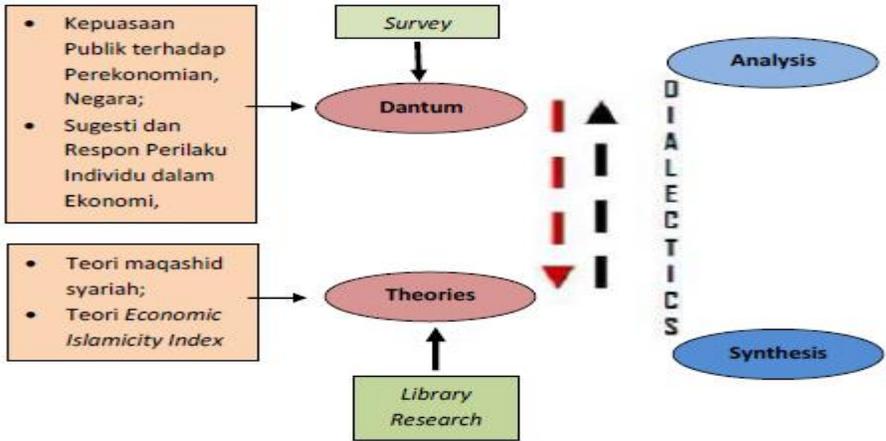
Metodologi seperti di atas, agaknya dapat diistilahkan dengan *dialectical research*: sebuah penelitian yang berusaha menghasilkan analisis yang tajam melalui proses dialektika antara data dan teori.²⁰ H. Russel Bernard (2006) menyebut itu dengan *synthesizing*²¹. Pada tataran praktis, metodologi ini berorientasi menghubungkan antara data dan teori yang telah ada. Data menguatkan teori, ataupun sebaliknya. Hal itu dapat dilihat dari skema berikut:

¹⁹ M. Sholihin. *Faqiah vs. Modernism: The Struggle of Salafiah Pesantren against Modernization*. Makalah Dipresentasikan di Intersym “Empowering Madrasa in the Global Context”, Bekasi 3-5 September 2013.

²⁰ Research seperti itu tidak hanya bertumpu pada data, tetapi lebih dari itu berusaha memahami data tanpa mengabaikan teori yang telah ada dan dihasilkan dari penelitian terdahulu.

²¹ Sintesisasi data dan teori dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara data dan teori; dimana data dipandu oleh teori sekaligus dianalisis berdasarkan *stock of theory* yang dimiliki oleh peneliti. Lihat H. Russel Bernard. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. (New York: Altamira Press, 2006). Hlm. 458.

Diagram 1. Dialektika antara data dan Teori



Survei²² dalam kajian ini ditujukan untuk memetakan kepuasan publik terhadap sistem ekonomi, perekonomian, dan regulasi negara terkait ekonomi. Indikator yang dijadikan untuk menjelaskan, dan sekaligus menjawab pertanyaan “Bagaimana sesungguhnya perekonomian Indonesia di mata publik? Apakah perekonomian tersebut sudah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi?” adalah: 1) Moral dan aktivitas ekonomi; 2) Preferensi terhadap mekanisme pasar di Indonesia; 3) Relasi ekonomi dan keberagaman. Dan seutuhnya survei ini ditujukan untuk melihat, dan memetakan tiga indikator seperti yang diurai.

²² Survei yang digunakan adalah survey online melalui google docs, kemudian disebar secara virtual dan online. Tidak seperti survey konvensional yang mengandalkan tatap muka, dan respon langsung, dan metodologi sampel yang semua itu berbiaya tinggi.

Namun survei yang dilakukan disini bukan dalam makna konvensional, melainkan survei dalam makna yang dikemukakan oleh Matthias Schonlau, Ronald D. Fricker, Jr. & Marc N. Elliot bahwa survei adalah alat yang didesain, biasanya dalam format *formal statistical inference* terhadap populasi yang relatif luas, dan besar. Kendati populasi begitu luas, pertimbangan biaya dan kualitas data yang diperoleh harus dipertimbangkan. Ini kemudian harus mendorong survei dikembangkan lebih inovatif, kontekstual dan menjangkau populasi yang lebih luas.²³ Kendati demikian, survei tidak dijadikan satu-satunya alat untuk memahami dan menjelaskan objek kajian ini. Teori seperti *maqashid syariah* dan *economic islamicity index* digunakan secara simultan untuk menganalisis, dan memaknai data yang didapatkan melalui survei on-line. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan teori *maqashid syariah* dan *economic islamicity index*; serta apa relevansinya dengan objek kajian ini?

Teori *maqashid syariah* telah menjadi *grand-theory* atau teori utama dalam kajian Islam, bahkan saat ini ia telah menjadi paradigma penelitian yang tidak dapat diremehkan. Mengapa demikian? Hal tersebut didorong oleh kenyataan alamiah, dan sosiologis bahwa setiap manusia, baik pada level individu maupun kelompok mengkehendaki terwujudnya kemaslahatan dan jaminan

²³ Lihat Matthias Schonlau, Ronald D. Fricker, Jr., Marc N. Elliot. *Conducting Research Surveys via E-Mail and the Web*. (Alington: Rand, 2002). Hlm. 1.

sosial-ekonomi. Dan tujuan syari'at diturunkan, diberlakukan, dan diajarkan oleh Allah *azza wa jalla* adalah menjamin agar setiap kehidupan manusia berjalan dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan. Asumsi ini kemudian yang menjadikan *maqashid syariah* diterima sebagai *grand-theory*. Tidak hanya digunakan dalam studi keislaman, tetapi juga relevan dijadikan teori dalam penelitian sosial. Dalam konteks ini kemudian Ibn Taimiyah memperkenalkan teori *maqashid syariah* yang relatif unik atau berbeda dengan teori *maqashid syariah* pada umumnya—*fiqh* ataupun *ushl fiqh*. Ibn Taimiyah membangun teori *maqashid syariah* melalui makna yang sangat tekstual, dan mengartikan *maqashid syariah* dari aspek penggunaannya dalam Bahasa Arab.²⁴ Dalam tradisi Arab, penggunaan kata *maqashid* selalu dibarengi dengan kata *syar'i*. Ini artinya *maqashid* memiliki hubungan yang erat dengan Pembuat Hukum, dan itu adalah Allah *azza wa jalla*—sumber awal dari hukum Islam. Melampaui terminologi ini, ada banyak makna yang dilekatkan pada *maqashid syariah*. Kendati demikian secara substansial, makna itu memiliki hubungan dan benang merah.

Demikian, Imam Al-Ghazali minsalnya; ia memaknai bahwa *kemaslahatan* adalah tujuan utama dari syariah, dan itu dapat diartikan sebagai usaha untuk menerapkan dan

²⁴ Lihat dalam Yusuf Ahmad Muhammad al Badawy. *Maqashid al Syariah 'inda Ibn Taimiah*. (Al-Ardan: Dar al Nifa'is, tt). Hlm. 43.

merealisasikan manfaat dan menolak kemudaratan.²⁵ Jika dielaborasi lebih dalam lagi, Tuhan mengkehendaki agar setiap manusia mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dan menghindar dari hal yang mendatang kemudaratan. Manusia bertanggungjawab tidak hanya terhadap dirinya, tetapi sekaligus terhadap orang lain. Begitu juga dengan negara. Dari konteks ini kemudian lahir teori *fiqh* yang berbunyi, “Tugas dan tanggungjawab negara adalah memelihara dan menjamin kesejahteraan rakyatnya.” Otomatis, ini mengisyaratkan apapun yang dirumuskan oleh setiap kelompok masyarakat, dan kelas sosial idealnya ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan—termasuk dalam membangun sebuah sistem ekonomi. Disamping teori *maqashid syariah*, konsepsi lain untuk kemudian dijadikan sebagai teori yang menjelaskan data yang didapat melalui survei pada penelitian adalah *economic islamicity index*; sebuah usaha untuk melihat dan memetakan seberapa islami dan berorientasi pada kemaslahatan sebuah sistem ekonomi di satu negara—dalam hal ini adalah perekonomian Indonesia.

Pada bulan Mei 2006, diadakan sebuah konferensi di Kuala Lumpur, Malaysia tentang Islam dan Hak Asasi Manusia yang dihadiri lebih dari 100 (seratus) sarjana Muslim yang ahli di bidang hukum. Konferensi ini mengukuhkan pertanyaan filosofis, yang kemudian menjadi stimulus lahirnya teori *economic islamicity*, dan

²⁵ Yusuf Ahmad Muhammad al Badawy. *Maqashid al Syariah...*, hlm. 46.

pertanyaan itu adalah: “...apakah benar-benar ada keseimbangan dan hubungan yang kuat antara otoritas institusional agama dan politik?”²⁶ Pertanyaan ini dikemudian hari melahirkan dua usaha akademik yang cukup prestisius dalam kajian Islam, dalam hubungannya dengan berbagai bidang kehidupan ekonomi, politik, dan hukum; usaha itu adalah *Shariah Index Project*; sebuah kerja akademik yang mencoba mengkuantifikasi dan membangun model terhadap negara Islam modern yang diinspirasi dari perspektif. Hasil lain adalah lahirnya *economic islamicity index*; ini adalah proses akademik dan empiris untuk mendefinisikan karakter dan kualitas suatu negara—keislamannya—tentunya dengan metode yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan tradisi hukum Islam dan prinsip-prinsip maqashid syariah.²⁷ Dalam hubungannya dengan dua teori tersebut, kajian ini akan mencoba mengembangkan sekaligus merumuskan beberapa indikator untuk mendefinisikan karakter ekonomi Indonesia, dan indikator itu tidak hanya diinspirasi dari tradisi hukum Islam tetapi juga dari tradisi sosiologis, dan ekonomi politik. Dengan demikian, perluasan indikator ini mampu mendefinisikan secara komprehensif karakter keislaman ekonomi di Indonesia.

²⁶ Annual Report 2008. *Shariah Index: State of the Muslim World*. Cardoba Initiative in Partnership with Gallup., hlm. 2.

²⁷ Annual Report 2008. *Shariah Index...*, hlm. 2-3.

PEMBAHASAN

Potret dan Karakter Perekonomian Indonesia

Muhammad Ali (2004) melalui tulisannya *Islam and Economic Development in New Order's Indonesia (1967-1998)* telah memaparkan proyek akademiknya yang mengkaji hubungan antara Islam dan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru di Indonesia. Ali menyimpulkan sesungguhnya Islam pada era itu tidak mampu mempengaruhi kehidupan publik, terlebih lagi pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan kuatnya usaha Presiden Soeharto untuk menerapkan ideologi pembangunan. Menariknya kelompok dan organisasi sosial-Islam tidak memperlihatkan sikap yang ambivalen dengan ideologi pembangunan, dan sama sekali tidak menolak ideologi tersebut. Sebaliknya yang lahir, dan menguat adalah pandangan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ideologi pembangunan yang diusung oleh rezim Orde Baru.²⁸ Tanpa disadari sikap pasif terhadap rezim orde baru telah menyebabkan sistem ekonomi Indonesia masuk ke dalam perangkap ekonomi pasar, atau menjadi jalan terbaik bagi sistem ekonomi neo-liberal mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia.

Apa yang disaksikan oleh Daromir Rudnycky (2009) terhadap perekonomian Indonesia di era kontemporer, pasca-runtuhnya Orde Baru adalah potret ekonomi neo-liberal yang

²⁸ Muhammad Ali. *Islam and Economic Development in New Order's Indonesia (1967-1998)*. Working paper: International Graduate Student Conference Series, No. 12: 2004., hlm. 1.

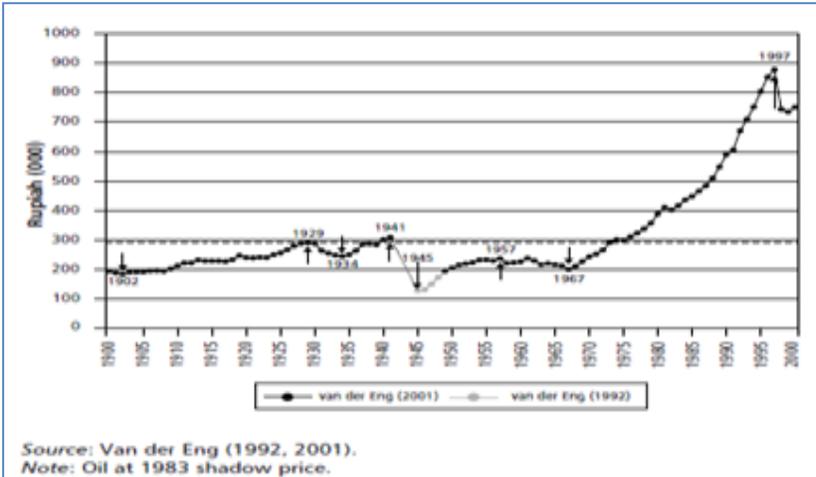
memasuki pertumbuhan yang subur dan berakar. Daromir menelusuri hal itu dari merebaknya aksi demonstrasi, dan aksi penentangan terhadap konglomerasi ekonomi di Indonesia dewasa ini—beberapa dekade setelah reformasi bergulir.²⁹ Hal ini dapat dimaknai bahwa sistem ekonomi neo-liberal tidak tumbuh begitu saja, melainkan ia telah dipupuk melalui ideologi pembangunanisme yang diusung oleh rezim Orde Baru. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya investasi asing di Indonesia, dan industrialisasi melalui kebijakan Repelita yang dirumuskan dan ditetapkan oleh rezim Orde Baru. Dengan cara itu kemudian negara dapat meningkatkan perekonomian, dan mendorong stabilitas ekonomi. Namun ironisnya sebuah stabilitas ekonomi yang lahir dari resep generik tidak akan berlangsung lama. Faktanya GDP (Gross Domestic Product) Indonesia terus meningkat dari tahun 1983 hingga tahun 1997³⁰. Setelah itu Indonesia memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan, sekaligus membuat *shock* banyak *stakeholders* ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

²⁹ Suatu ketika Daromir Rudnyckj menyaksikan demonstrasi besar-besaran buruh PT. Krakatau Steel yang menentang kebijakan perusahaan tersebut dalam hal upah. Terikan kalimat: “Who are you? Who is your god? What is your book?” Setidaknya mengindikasikan bahwa konglomerasi dan tumbuhnya neo-liberal telah mempengaruhi kultur perusahaan besar di Indonesia, yang meminggirkan pekerja dan kaum buruh. Lihat Daromir Rudnyckj. *Spiritual Economics: Islam and Neoliberalism in Contemporary Indonesia*. Journal of Cultural Anthropology, Vol. 24, Issues I: 2009., hlm. 104.

³⁰ Lihat Howard Dick, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad & Thee Kian Wie. *Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2002), hlm. 6.

Grafik 1.

GPD Perkapita Indonesia, 1900-2000



Kondisi perekonomian tersebut diistilahkan dengan “*bust and boom*”; gelembung dan ledakan, dimana pada beberapa periode perekonomian meningkat dan menghasilkan pertumbuhan yang mencenggangkan. Tetapi tidak berlangsung lama, ledakan terjadi dalam bentuk kenaikan harga atau inflasi dan melemahnya mata uang, naiknya kebutuhan dasar sehingga menimbulkan kepanikan ekonomi—ini kemudian yang disebut dengan *boom*. Dari grafik di atas, stagnasi pada abad ke-19, menurut Howard Dick, disebabkan oleh apa yang diistilahkan dengan *poor world commodity prices* dan *crop failures*³¹; sebuah kondisi kenaikan harga-harga komoditas dunia dan gagal panen di banyak negara sehingga membuat banyak negara terjatuh pada periode krisis. Dari sini

³¹ Howard Dick, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad & Thee Kian Wie. *Economy...*, hlm. 6.

kemudian rezim Orde Baru belajar, dan mencanangkan proyek swasembada beras sebagai gerakan pemberdayaan pertanian. Implikasi dari gerakan ekonomi hijau tersebut, seperti yang dimaknai oleh Jeffrey D. Sachs & Susan M. Collins adalah masuknya Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di era 1980-an.³² Tetapi sayang, semua gerakan ini disusupi dengan agenda industrialisasi dengan membuka peluang sebesar-besarnya kepada korporasi asing untuk menguasai sumber-sumber ekonomi penting. Dalihnya sederhana disebabkan sumber daya manusia Indonesia yang sangat terbatas. Kebijakan yang terlalu lunak terhadap korporasi asing untuk kemudian disebut dengan MNC (Multinational Corporation) dan TNC (Transnational Cooperation) terus berlangsung hingga pasca runtuhnya Orde Baru. Dalam waktu yang tidak cukup lama telah memperlihatkan eksternalitas negatif, atau dampak buruk terhadap imunitas ekonomi rakyat. Bagaimana hal ini kemudian dijelaskan, dan bagaimana kemudian teori *maqashid syariah* memaknai hal tersebut?

Bercokolnya sistem ekonomi neo-liberal dalam satu negara dapat ditelusuri dari beberapa hal: *Pertama*, tumbuhnya doktrin liberalisasi ekonomi. Doktrin ini secara filosofis mengasumsikan bahwa sebuah negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi jika

³² Jeffrey D. Sachs & Susan M. Collins (eds.). *Developing Country Debt and Economic Performance: Country Studies—Indonesia, Korea, Philippines, Turkey*. (London: The University of Chicago Press, 1989), hlm. 2.

pemerintah dan rakyatnya meyakini bahwa kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah kunci bagi akselerasi ekonomi. Doktrin ini didukung oleh tiga pilar utama, yakni hak kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas.³³ *Kedua*, negara terlalu percaya pada mekanisme pasar. Hal itu didasari oleh pandangan bahwa pasarlah satu-satunya cara paling efektif untuk mengorganisir eksistensi dan kebutuhan manusia. Itu membuat banyak ruang dan aspek, serta apa yang diinginkan oleh manusia menjadi hal yang sangat mungkin.³⁴ *Ketiga*, negara memperlihatkan sikap yang anti terhadap intervensi pasar. Secara praktis, pasar dibiarkan bergerak sendiri dan mencari titik keseimbangannya sendiri.³⁵ Dengan pola dan pendekatan itu kemudian negara mengasumsikan perekonomian akan tumbuh dengan sendirinya. Pertanyaannya, bagaimana kriteria ini dihubungkan dengan perekonomian Indonesia?

Michael Foucault, seperti yang dipaparkan kembali oleh Graham Burchell, memaknai pasif dan melunaknya negara terhadap neoliberalisme sebagai sebuah kondisi dimana negara tidak metodologis dan rasional dalam bersikap terhadap sistem

³³ Lihat Alison Stenning, Adrian Smith, Alena Rochovská & Darius Światek. *Domesticating Neo-liberalism: Spaces of Economic Practice and Social Reproduction in Post-Socialist Cities*. (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010). Hlm. 33.

³⁴ Alison Stenning, Adrian Smith, Alena Rochovská & Darius Światek. *Domesticating Neo-liberalism...*, hlm. 34.

³⁵ Alison Stenning, Adrian Smith, Alena Rochovská & Darius Światek. *Domesticating Neo-liberalism...*, hlm. 34.

ekonomi neo liberalisme.³⁶ Pandangan dapat dimaklumi, karena terlalu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap manusia dan korporasi untuk melakukan aktivitas ekonomi, maka kebebasan itu akan menjadi kutukan bagi perekonomian negara. Betapa tidak, kebebasan itu akan menghantarkan pada ekspansi korporasi terhadap sumber-sumber ekonomi dan persaingan yang tidak sehat dalam pasar. Spekulasi dan tumbuhnya aktivitas *underground economy*, atau perdagangan dan aktivitas ekonomi yang tidak sah, ilegal serta haram akan tumbuh seiring kebebasan yang tanpa batas tersebut. Agak berbeda dengan pandangan tersebut, kaum materialisme melihat bahwa muncul dan menguatnya ekonomi neo-liberal merupakan reaksi kelas elit terhadap militansi buruh serta menurunnya tingkat profitabilitas korporasi.³⁷ Pertarungan antara kelas buruh dan korporasi akan terlihat jelas. Di Indonesia pun hal sudah terlihat beberapa dekade belakangan.

Setidaknya dari tahun 1995-2000 ada 1.419 kasus unjuk rasa dan pemogokan yang digelar buruh di Indonesia.³⁸ Ini menjadi indikator ketidakpuasan kelompok pekerja di Indonesia terhadap

³⁶ Lihat Andrew Barry, Thomas Osborne & Nikolas Rose (eds.). *Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-Liberalism and Rationalities of Government*. (London: The University of Chicago Press, 1996). Hlm. 19.

³⁷ Lihat dalam Philip Arestis & Malcolm Sawyer. *The Rise of the Market: Critical Essays on the Political Economy of Neo-Liberalism*. (Northampton: Edward Elgar, 2004). Hlm. 38.

³⁸ Rantri Virianita. *Partisipasi Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Edisi Desember: 2008. Hlm. 321.

kultur ekonomi yang dibangun oleh banyak korporasi dan perusahaan intensif tenaga kerja di Indonesia. Persoalan yang disuarakan oleh kaum buruh berkisar pada masalah upah yang tidak adil, kebijakan *outsourcing*, dan pemutusan hubungan kerja. Bagaimana hal ini dihubungkan dengan sistem perekonomian yang tumbuh di Indonesia? Konflik antara buruh dan perusahaan di Indonesia hanya satu dari indikator betapa sistem ekonomi Indonesia terlalu mengedapankan, dan memelihara kepentingan korporasi ketimbang rakyat. Indikator lain yang dapat dikemukakan adalah persentase aktivitas *underground economy* di Indonesia. No-Wook Park, peneliti dari Korea Institute of Public Finance, telah mencatat setidaknya terjadi trend peningkatan *underground economy* di Indonesia. Tahun 1992-2000 aktivitas *underground economy* di Indonesia berkisar 19.4%; di tahun 2000-2001 meningkat menjadi 21.8%; dan pada tahun 2002-2003 meningkat lagi menjadi 22.9%.³⁹ Angka ini setidaknya mengisyaratkan perekonomian Indonesia bergerak ke arah disorientasi ekonomi, dan nihilisasi ekonomi: sebuah kondisi dimana ekonomi mulai berjarak dari spritualitas dan keberagamaan. *Trend* atau kecenderungan sistem ekonomi Indonesia yang mengarah dan sedang menuju ke arah neo-liberalisme ekonomi, agaknya dapat diukur atau dibandingkan dari beberapa kriteria ekonomi Islam dan mempertimbangkan *maqashid syariah*. Pengkaji ekonomi Islam,

³⁹ No-Wook Park. *Underground Economy: Causes and Size*. (Unpublished-Documnt: Power Point Korea Institute of Public Finance, 2005).

atau kemudian disebut dengan ekonom Muslim telah merumuskan kriteria dari sebuah sistem perekonomian yang berbasis pada *maqashid syariah* dan menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi kebijakan ekonomi. Kurshid Ahmad berpendapat bahwa sebuah sistem perekonomian Islami, secara filosofis didasari secara sistemik untuk mencapai *al-falah* (kesejahteraan) dalam arti khilafah, tauhid rububiyah, dan tazkiyyah. Sistem itu secara ekonomis ditujukan untuk menghapuskan kemiskinan, dan membatasi privatisasi.

Secara sosial, sistem ekonomi Islam akan menjadi gerakan kontinu untuk menghapuskan ketidakadilan ekonomi terhadap masyarakat, serta menghilangkan eksploitasi yang biasanya diperlihatkan oleh korporasi dan pemilik modal terhadap kaum buruh. Berbeda dengan kriteria yang dikemukakan oleh Chaudary, sistem ekonomi islami akan menjadi dasar dan kekuatan bagi negara untuk menyediakan kebutuhan pokok rakyat, dan meningkatkan moralitas, material dan kesejahteraan. Selain itu, ia menjadi promotor yang paling kuat untuk menciptakan keadilan sosial dan persaudaraan, serta persatuan rakyat.⁴⁰ A.A. Khan dengan substansi yang sama, namun dengan redaksi yang berbeda mengetengahkan bahwa kriteria perekonomian islami dalam domain, atau aspek *self-based objective* sebagai sebuah sistem

⁴⁰ Lihat Mustafa Omar Mohammad & Syahidawati Shahwan. *The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid al-Shariah: A Critical Review*. Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 13: 2013. Hlm. 75.

ditujukan untuk mengapai, merealisasikan kesejahteraan atau *falah* baik pada wilayah kekuasaan maupun martabat manusia.⁴¹ Terkait dengan kriteria itu, jika dihubungkan dengan konteks perekonomian Indonesia, maka akan terlihat berbagai paradoks yang terpampang di dalam sistem dan praktek perekonomian. Kasus pencucian uang, atau *money laundry* minsalnya. Setidaknya terdapat 147 kasus yang dicurigai (*suspicious transaction*) oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan) sebagai pencucian uang. Fakta lain dari paradoks itu adalah besarnya cadangan devisa untuk membiayai kebutuhan impor barang modal, bahan baku, barang penolong, dan impor minyak tercemin pada transaksi berjalan yang mengalami defisit selama 7 kuartal terakhir ini. Dan, tercermin pula besarnya defisit pada kuartal I/2013 sebesar 5,8 miliar dolar AS dan kuartal II/2013 meningkat lagi, menjadi 9 miliar dolar AS. Semakin besarnya defisit transaksi berjalan diakibatkan pembelian modal, bahan baku dan minyak, maka cadangan devisa sangat besar tersedot. Maka nilai rupiah mudah mengalami tekanan seperti saat ini. Jika tidak ada perbaikan pada industri, mengerem kebutuhan minyak dan tidak mengembangkan industri berbasis ekspor, rupiah dan perekonomian Indonesia rentan mengalami krisis.⁴² Data yang

⁴¹ Mustafa Omar Mohammad & Syahidawati Shahwan. *The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid al-Shariah...*, hlm. 77.

⁴² Sabaruddin Siagian. *Dilema Perekonomian Indonesia*. Suara Karya, 13 Agustus 2013.

dipaparkan oleh Sabaruddin Siagian ini mengandaikan bahwa negara tidak terlalu kuat mempengaruhi, dan mengontrol mekanisme pasar. Bagaimana hal ini dimaknai berdasarkan *maqashid syariah*?

Kaidah “Tanggungjawab pemimpin—kepala negara, dan pejabat negara lainnya—sepenuhnya terletak pada penciptaan, dan realisasi kemaslahatan rakyat,” membuat negara sadar atau tidak, dan dalam kondisi apapun idealnya menjadikan kemaslahatan—kesejahteraan ekonomi dan sosial—sebagai muara dari setiap regulasi yang dirumuskan oleh negara. Tetapi hal itu masih belum terealisasi, dan menjadi kenyataan sosio-ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari opini, dan pandangan publik terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Dari survei yang dilakukan terlihat bahwa 73% responden menilai bahwa sistem perekonomian tidak akan mampu menciptakan keadilan ekonomi. Hal ini bukan disebabkan oleh sistem, melainkan praktek dan nalar aparatus yang mengatur, merumuskan regulasi lah yang menjadi faktor mengapa keadilan ekonomi di Indonesia tidak pernah terwujud. Jika pun ada sebagian masyarakat di ranah publik yang merasakan keadilan ekonomi. Itu hanya sebatas pemberian kebebasan bagi seluruh aktor ekonomi dan rakyat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi ironisnya, kebebasan itu tidak dibarengi dengan kesempatan atau lowongan pekerjaan. Tidak berlebihan kemudian, jika publik memahami dan merasakan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia hanya mendorong terjadinya konglomerasi ekonomi,

dan memperlebar gap sosial di kalangan rakyat. Setidaknya 45% responden berpendapat seperti itu. Pertanyaan kemudian yang layak dimunculkan adalah: “Ketika aparatus negara menjalankan perekonomian, dan membangun sistem ekonomi yang tidak lagi berkorelasi dengan agama—ekonomi neo-liberal; lantas bagaimana perilaku ekonomi yang cenderung diperlihatkan oleh umat? Apakah memperlihatkan keshalehan, dan mempertimbangkan moral atau sebaliknya?”

Faktanya, 69% responden mengakui ketika dihadapkan pada persaingan ekonomi yang tidak sehat, mereka akan selalu mempertimbangkan moralitas dan kemaslahatan kendati mereka akan mengalami kerugian disebabkan pilihan tersebut. Implikasi dari sugesti ini adalah lahirnya pandangan yang relatif massif di kalangan umat Islam. Setidaknya 60% responden menyatakan bahwa Islam harus dijadikan dasar dari sistem perekonomian, dan turut mewarnai sistem perekonomian. Sehingga tidak mengherankan jika 67% responden menolak untuk berpendapat bahwa Islam menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan doktrin ekonomi Islam yang juga tidak menolak mengejar keuntungan pribadi, namun tidak lupa akan kepentingan akhirat. Dalam konteks ini kemudian 44% responden setuju bahwa mengejar keuntungan pribadi, secara otomatis akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Kebaikan itu diwujudkan dengan mengeluarkan zakat, sedekah, dan wakaf. Dengan mekanisme ini kemudian ekonomi Islam mewujudkan, dan

merealisasikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Hal tersebut adalah tujuan dari syariat, atau *maqasid syariah*. Dalam konteks tersebut, Asyraf Wajdi Dusuki dan Said Bouheraoua dengan tegas menandakan bahwa tujuan Allah *azza wa jalla* memformulasi syariat adalah untuk menjamin agar setiap aktivitas, dan perilaku termasuk dalam hal aktivitas ekonomi mengarah pada kemaslahatan—terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial.⁴³ Ironisnya, kendati di tingkat akar rumput memperlihatkan kecenderungan meningkatnya spritualitas ekonomi. Namun performance perekonomian Indonesia belum Islami jika diukur berdasarkan kriteria *maqasid syariah*⁴⁴. Dan kriteria itu mengerucut pada tanggungjawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan—*hifzhu mal, nafsi, wa dien* atau upaya memelihara harta, individu, dan agama. Meskipun Indonesia adalah negara bagi penduduk yang mayoritas beragama Islam, tetapi hal ini tidak niscaya menjadikan segala sesuatu yang ada di Indonesia Islami, dan religius.

Demikian, Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari telah mencoba mengukur tingkat religiusitas ekonomi di satu negara melalui upaya induksi prinsip dan dasar ekonomi Islam; dan

⁴³ Asyraf Wajdi Dusuki & Said Bouheraoua. *The Framework of Maqasid al-Shariah (Objective of the Shari'ah) and Its Implications for Islamic Finance*. ISRA research Paper, No. 22/2011. Hlm. 3.

⁴⁴ Lihat Murat Cizakca. *Democracy, Economic Development and Maqasid Al-Shariah*. Review of Islamic Economics, Vol. 11, No. 1: 2007. Hlm. 109.

itu secara langsung berasal dari Al-Qur'an dan praktek serta perkataan Nabi Muhammad saw.⁴⁵ Islam adalah agama yang didasarkan pada aturan-aturan, serta ia adalah sebuah sistem nilai; moral; sekaligus menjadi sistem sosial-ekonomi, sehingga dapat dimaknai bahwa dalam Islam segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi telah diatur dan diberikan panduannya—fiqh muamalah, dan nilai-nilai moral-etis ekonomi. Dari konteks itu kemudian pembangunan ekonomi, dan pengembangannya selalu didasari oleh keadilan sosial. Hal itu merupakan unsur fondasional dari sistem ekonomi Islam.

Tidak dapat diingkari, bahwa negara dan individu diwajibkan untuk mengoptimalkan usaha, tenaga, dan nalar untuk memformulasikan dan menerapkan berbagai strategi yang bisa secara simultan menghilangkan faktor-faktor yang akan menghalangi pembangunan intelektual masyarakat Islam, pertumbuhan ekonomi, dan kebebasan sosial yang berbasis pada keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.⁴⁶ Ketika prinsip, dan kriteria ini dihubungkan dengan perekonomian Indonesia; maka tidak mengherankan jika publik dalam hal ini adalah responden menilai bahwa perekonomian Indonesia masih jauh dari ekonomi religius. Bahkan dikuatkan oleh penelitian Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari meletakkan Indonesia pada *ranking*

⁴⁵ Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari. *An Economic...*, hlm. 11.

⁴⁶ Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari. *An Economic...*, hlm. 12.

ke-104 dalam indek *islamicity* ekonomi⁴⁷. Ini artinya perekonomian Indonesia tidak terlalu religius, dan lebih dekat kepada ekonomi neo-liberalisme yang terlalu mempertimbangkan dan memelihara kepentingan korporasi, pemilik modal ketimbang mendorong keadilan sosial-ekonomi. Tentunya itu bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan menjauhnya perekonomian Indonesia dari religiusitas. Mulai dari indikator keadilan gender, pasar tenaga kerja, kemudahan mendirikan usaha atau bisnis, kebebasan ekonomi, hingga kesejahteraan sosial. Semua ini dalam penilaian Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari, masih belum begitu terlihat dan mengakar dalam perekonomian Indonesia. Alhasil, tidak mengherankan jika perekonomian Indonesia belum dapat dikatakan religius. Jikapun perbankan syariah tumbuh dengan suburnya, hal itu masih sangat parsial dan sangat bisnis *oriented*. Sehingga tidak terlalu menyumbangkan pada kualitas religiusitas perekonomian.

KESIMPULAN

Dari data survei dan kajian atas data sekunder lainnya, agaknya ada satu tesis yang dapat dikemukakan dalam kajian ini, dan itu adalah: “Kini Indonesia tengah dihadapkan pada ambivalensi religiusitas negara dan perilaku ekonomi rakyat: sebuah hubungan negatif, antara kebijakan ekonomi negara dan perilaku ekonomi

⁴⁷ Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari. *An Economic...*, hlm. 19.

rakyat. Ketika negara merumuskan kebijakan ekonomi terjebak pada neo-liberalisme, dan semakin jauh dari prinsip-prinsip Islam. Kendati demikian kecenderungan yang berbeda terjadi di level masyarakat. Ada kesadaran religius baru yang muncul di masyarakat, sehingga setiap perilaku ekonomi cenderung didasari dan mengikutsertakan argumentasi moral dan religius. Ini ditunjukkan oleh fakta semakin suburnya perbankan syariah, sehingga dapat diartikan bahwa masyarakat dalam hal ini adalah umat Islam bahkan umat agama lain, penting membebaskan diri dari transaksi-transaksi ribawi.” Bahkan hasil survei⁴⁸ menunjukkan 63% responden akan selalu membuat keputusan ekonomi—dalam hal membeli barang atau jasa—untuk sepenuhnya mempertimbangkan sejauh mana aktivitas itu bermanfaat dan tidak merusak jiwa, raga, bahkan sangat mengharapkan keberkahan setiap kali melakukan transaksi ekonomi.

Kendati cenderung mempertimbangkan moralitas, pada umumnya masyarakat Indonesia ketika melakukan aktivitas ekonomi tidak lantas menghindar dari hasrat untuk mencari keuntungan. Namun tentunya dalam makna yang berbeda dengan pencarian keuntungan versi sekuler-kapitalisme. Bagi umat Islam di Indonesia, proses pencarian keuntungan akan otomatis memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tumbuh dan

⁴⁸ Survei dilakukan bulan Desember 2019.

berdaya secara ekonomi. 56% responden menyakini hal itu. Bagi mereka alasannya sangat sederhana, Islamlah sesungguhnya yang mengajarkan pencarian keuntungan dan beramal shaleh dengan mengeluarkan zakat dan hak orang lain yang ada dalam setiap harta yang dianugerahi oleh Allah *azza wa jalla*. Dengan demikian, ikatan persaudaran dan kohesi sosial akan terbangun dengan otomatis. Bahkan tidak hanya itu, mengeluarkan zakat adalah satu bagian dari pembentuk rasa nyaman dan bahagia. Penyumbang lainnya adalah berbuat baik, dan melakukan aktivitas ekonomi yang diridhai serta sesuai dengan aturan Islam. Faktanya, 82% responden akan merasakan kepuasan yang sama ketika melakukan aktivitas ekonomi yang islami serta akan merasakan kebahagiaan yang berlipat ganda ketika menunaikan zakat. Tidak berhenti di titik itu, ketika mereka diberi pilihan sistem keuntungan seperti apa yang akan mereka pilih ketika melakukan kerjasama perdagangan dan bisnis; 86% responden menjawab akan memilih sistem bagi keuntungan-kerugian atau *profit and loss sharing*. Sementara hanya 14% yang lebih memilih bagi keuntungan *an sich*. Dari kecenderungan seperti ini kemudian tesis bahwa religiusitas ekonomi di level masyarakat meningkat, sementara di level kebijakan negara menunjukkan penurunan.□

DAFTAR PUSTAKA

Al Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al Syariah 'inda Ibn Taimiah*. (Al-Ardan: Dar al Nifa'is, tt).

Annual Report 2008. *Shariah Index: State of the Muslim World*. Cardoba Initiative in Partnership with Gallup.

Ali, Muhammad. *Islam and Economic Development in New Order's Indonesia (1967-1998)*. Working paper: International Graduate Student Conference Series, No. 12: 2004.

Arestis, Philip & Malcolm Sawyer. *The Rise of the Market: Critical Essays on the Political Economy of Neo-Liberalism*. (Northampton: Edward Elgar, 2004).

Barry, Andrew, Thomas Osborne & Nikolas Rose (eds.). *Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-Liberalism and Rationalities of Government*. (London: The University of Chicago Press, 1996).

Blank, Rebecca M. & William McGurn. *Is the Market Moral? A Dialogue on Religion, Economics & Justice*. (Washington, D.C: Brooking Institution Press, 2004).

Bernard, H. Russel. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. (New York: Altamira Press, 2006).

Cizakca, Murat. *Democracy, Economic Development and Maqasid Al-Shariah*. Review of Islamic Economics, Vol. 11, No. 1: 2007.

Case, Karl E. & Ray C. Fair. *Principle of Economics*. (New York: Prentice Hall, 2003).

Dick, Howard, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad & Thee Kian Wie. *Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2002).

Dusuki, Asyraf Wajdi & Said Bouheraoua. *The Framework of Maqasid al-Shariah (Objective of the Shari'ah) and Its*

Implications for Islamic Finance. ISRA research Paper, No. 22/2011. Hlm. 3.

Glaser, Barney G. & Anselm L. Strauss. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research.* (London: Aldine Transaction, 2006).

Ghazanfar, S.M. & S. Todd Lowry. *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the “Great Gap” in European Economics.* (New York: Routledge, 2003).

Hills, John & Kitty Stewart (eds.). *A More Equal Society?: New Labour, Poverty, Inequality and Exclusion.* (United Kingdom: Policy Press, 2005)

Mises, Ludwig von. *A Critique of Interventionism.* (New York: Springer, 1977).

Mohammad, Mustafa Omar & Syahidawati Shahwan. *The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid al-Shariah: A Critical Review.* Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 13: 2013.

Park, No-Wook. *Underground Economy: Causes and Size.* (Unpublished-Documents: Power Point Korea Institute of Public Finance, 2005).

Rudnyckij, Doramir. *Spiritual Economics: Islam and Neoliberalism in Contemporary Indonesia.* Journal of Cultural Anthropology, Vol. 24, Issues I: 2009.

Rehman, Scheherazade S & Hossein Askari. *An Economic Islamicity Index (EI²).* Global Economy Journal. Vol. 10, Issued 3-2010.

Sholihin, M. *Faqiah vs. Modernism: The Struggle of Salafiah Pesantren against Modernization.* Makalah Dipresentasikan di Intersym “Empowering Madrasa in the Global Context”, Bekasi 3-5 September 2013.

Schonlau, Matthias, Ronald D. Fricker, Jr., Marc N. Elliot. *Conducting Research Surveys via E-Mail and the Web*. (Alington: Rand, 2002).

Sachs, Jeffrey D. & Susan M. Collins (eds.). *Developing Country Debt and Economic Performance: Country Studies—Indonesia, Korea, Philippines, Turkey*. (London: The University of Chicago Press, 1989)..

Stenning, Alison, Adrian Smith, Alena Rochovská & Darius Światek. *Domesticating Neo-liberalism: Spaces of Economic Practice and Social Reproduction in Post-Socialist Cities*. (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010).

Siagian, Sabaruddin. *Dilema Perekonomian Indonesia*. Suara Karya, 13 Agustus 2013.

Turner, Bryan S.. *Islam, Capitalism and the Weber Theses*. *The British Journal of Sociology*. Vol. 25, No. 2-June, 1974.

Virianita, Rantri. *Partisipasi Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Edisi Desember: 2008.

Waterman, A.M.C.. *Revolution, Economics and Religion: Christian Political Economy, 1798-1833*. (New York: Cambridge University Press, 1991).